

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kepolisian Resor (Polres) Jember dalam upaya pencegahan tindak pidana judi online guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris (naratif-sosiologis) dengan pendekatan deskriptif analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan Teori Kebijakan Kriminal Marc Ancel dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Jember menerapkan kebijakan kriminal komprehensif yang mengintegrasikan jalur non-penal (pre-emptif dan preventif) dan jalur penal (represif). Upaya pre-emptif dan preventif dijadikan sebagai strategi hulu utama melalui edukasi literasi digital, penguatan imunitas sosial masyarakat, pemetaan wilayah rawan, patroli siber, serta penerapan Teori Pencegahan Situasional untuk menyumbat jalur transaksi keuangan dan akses perjudian digital. Sementara itu, jalur penal difungsikan sebagai kontrol sosial formal melalui tindakan pro-justitia berdasarkan KUHP dan UU ITE terhadap agen, penampung rekening, serta influencer lokal guna memberikan efek jera. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan yurisdiksi dan infrastruktur forensik digital, kebijakan preventif integratif ini terbukti rasional dalam menekan prevalensi perjudian daring di Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Polres Jember, Pencegahan Kejahatan, Judi Online, Cybercrime.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Jember Resort Police's (Polres Jember) policies in preventing online gambling crimes to reduce criminality within the jurisdiction of Jember Regency. The research method employed is empirical legal research (narrative-sociological) with an analytical descriptive approach. Legal materials were analyzed qualitatively based on Marc Ancel's Criminal Policy Theory and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The results indicate that Polres Jember applies a comprehensive criminal policy integrating non-penal (pre-emptive and preventive) and penal (repressive) tracks. Pre-emptive and preventive measures serve as the primary upstream strategy through digital literacy education, strengthening social immunity, mapping vulnerable communities, cyber patrols, and applying Situational Crime Prevention Theory to block financial transactions and digital access. Meanwhile, the penal track functions as formal social control through pro-justitia actions based on the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) against local agents, account holders, and local influencers to create a deterrence effect. Despite jurisdictional limitations and digital forensics infrastructure challenges, this integrative preventive policy proves rational in reducing the prevalence of online gambling in Jember Regency.

Keywords: Criminal Policy, Jember Resort Police, Crime Prevention, Online Gambling, Cybercrime.